



Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Jogja terhadap Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

## 2023 Tahun Politik, Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Aktivitas Demokrasi



SIGIT WICAKSONO

ADA kesalahan memaknai gender yang disamakan dengan jenis kelamin. Gender diartikan selalu terkait dengan perempuan. Seharusnya gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis.

"Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki serta perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya yang dapat berubah dari waktu ke waktu," ucap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jogja Sri Retnowati.

Dikatakan, isu gender menjadi salah satu isu utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Masalah mendasar dalam upaya pening-

katan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodasi pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. "Anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan," lanjutnya.

Apa yang disampaikan Retno itu merupakan tanggapan fraksinya atas diajukan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Pj Wali Kota Jogja Sumadi. Tanggapan itu disampaikan Fraksi Partai Golkar saat rapat paripurna DPRD Kota Jogja pada Kamis (16/3) lalu

► Baca 2023... Hal 7



AKSI NYATA: Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono (kiri) meminta alokasi anggaran program penyelenggaraan pengarusutamaan gender menjadi prioritas. Perempuan didorong banyak berperan.

## 2023 Tahun Politik, Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Aktivitas Demokrasi

Sambungan dari hal 1

PUG bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Gender, lanjut dia, bermakna laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelamin. Sedangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Ketua Fraksi Partai NasDem Sigit Wicaksono mempertanyakan aksi nyata program Pemkot Jogja yang sudah berjalan selama ini. Kondisi itu bakal memberikan gambaran

dalam pembahasan di pansus. Fraksi Partai NasDem juga menyinggung soal monitoring dan evaluasi. Dia menekankan agar pemkot memprioritaskan pada aksi nyata program kerja yang mengarah pada pengarusutamaan gender. "Ini kami coba tekankan agar realisasi keadilan dan kesetaraan gender segera terwujud," ungkap Sigit.

Dia mengusulkan ke depan agar proses sosialisasi perda yang telah disepakati dapat dimaksimalkan. Ini agar masyarakat memahami telah lahirnya payung hukum sehingga dalam pelaksanaan

program kerja mengarah pada kesetaraan gender.

Tidak hanya itu, Sigit juga mengupas soal persentase anggaran penyelenggaraan PUG yang dialokasikan di APBD Kota Jogja. Bila belum menuju angka ideal, Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar ditambahkan di APBD Perubahan TA 2023.

"Ini mengingat 2023 adalah tahun politik. Penting mendorong keterlibatan perempuan dalam aktivitas demokrasi melalui program kerja daerah yang banyak melibatkan perempuan," pintanya. Sedangkan Fraksi PKS me-

nilai indeks pemberdayaan gender Kota Jogja 73,18 masih di bawah Provinsi DIY 76,57. Karena itu, Ketua Fraksi PKS Triyono Hari Kuncoro mendukung adanya Perda Penyelenggaraan PUG agar implementasi PUG dapat terukur berdasarkan indikator yang jelas.

"Tantangan pelaksanaan PUG ke depan adalah analisis gender dilakukan sebelum penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Utamanya dalam implementasi anggaran responsif gender (ARG)," katanya. (kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005